

SKRIPSI

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), BELANJA MODAL, JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR

Muhammad Mihraj Arib

A011171326



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN
2024**

SKRIPSI

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), BELANJA MODAL, JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR

Sebagai salah satu persyaratan untuk

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

Muhammad Mihraj Arib



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN
2024**

SKRIPSI

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), BELANJA MODAL, JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD MIHRAJ ARIB

A011171326

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 11 Juni 2024

Pembimbing 1



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.si., CPF., CWM®

NIP 19690413 199403 1 003

Pembimbing 2



M. Agung Ady Mangilep, SE., M.SI

NIP 19740315 200312 1 002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE, M.Si CWM®

NIP 19740715 20002121 003

SKRIPSI

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), BELANJA MODAL, JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh





MUHAMMAD MIHRAJ ARIB

A011171326

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

pada tanggal 11 Juni 2024 dan

dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM.	Ketua	
2.	M. Agung Ady Mangilep, SE., M.Si.	Sekretaris	
3.	Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si.	Anggota	
4.	Randi Kumiawan, SE., M.Sc.	Anggota	

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Mihraj Arib
Nomor Pokok : A011171326
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonnomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Jenjang : Sarjana (S1)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal, Jumlah Penduduk terhdap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Makassar**. Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lian, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Agustus 2024

Yang menyatakan



(Muhammad Mihraj Arib)

A011171326

PRAKATA

**Bismillahirohmanirrohim,
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.**

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Belanja Modal, Jumlah Penduduk Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Makassar” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat sebagai pemenuhan persyaratan bagi penulis mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Penulis juga berharap masalah ekonomi yang penulis kaji dapat tergambarkan dalam bentuk skripsi sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah penulis peroleh selama menjadi mahasiswa ekonomi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka akan menerima kritik maupun masukan dari pembaca terkait tulisan ini agar skripsi ini dapat berguna lebih baik bagi para pembaca. Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan banyak pembelajaran terkait masalah yang diteliti serta membangkitkan semangat untuk melahirkan karya-karya lainnya.

Tidak dapat dipungkiri dalam penyusunan karya tulis ini tidak terlepas dari partisipasi beberapa pihak terkait yang telah mendukung penulis secara penuh. Maka dari itu, penulis merasa wajib menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka secara khusus sebagai berikut:

1. Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. atas kehendak dan karunia-Nya yang memberikan penulis kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad rasullullah SAW dan seluruh keluarganya yang telah memberi Rahma terhadap seluruh alam.

2. Kedua orang tua saya yang telah mendidik, memotivasi, dan memberikan dukungan lahir dan batin. Terima kasih telah menjadi orang tua yang berhasil membawa penulis hingga seperti saat ini.
3. Kepada guru penulis yakni Bang Nevy Jamest yang telah mendidik dan menjarkan banyak hal kepada penulis dalam: berkehidupan sebagai manusia, beradventure, menghargai seluruh makhluk ciptaan tuhan, mencerahkan pikiran penulis yang telah lama terjebak dalam kegelapan, memotivasi, dan mengajarkan nilai – nilai kehidupan.
4. Syukur dan doa kepada seluruh leluhur tanah selatan Sulawesi yang telah meletakkan peradaban dan berjuang untuk tanah ini, sehingga banyak generasi masih dapat menjalankan kehidupan dan beraktivitas di wilayah ini.
5. Bapak Dr. Sabir, SE, M.Si CWM® selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Ekonomi.
6. Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM., selaku pembimbing I dan M. Agung Ady Mangilep, SE., M.Si., selaku pembimbing II, penulis sangat berterimakasih atas segala pemikiran, ide, bantuan, arahan, nasehat, kesabaran, dan waktu yang diluangkan Selama proses hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Dosen penguji Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si., dan Randi Kumiawan, SE., M.Sc. penulis mengucapkan banyak terimakasih atas saran dan kritik terhadap hasil penelitian sehingga lebih menyempurnakan tugas akhir ini tak luput pula para penguji telah membantu menyadarkan kekurangan dan telah meluruskan pikiran penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pengetahuan dan menginspirasi, terima kasih atas segala pembelajaran dan bantuan selama masa studi penulis.
9. Staf dan karyawan akademik dan Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu dalam segala hal

terkait berkas dan dokumen akademik.

10. Teman – teman kiwi land dan FISS (Forum Intelektual Selatan Sulawesi) yang telah banyak menemani berdiskusi dan berjuang bersama. Terima kasih atas segala pengertiannya.
11. Saudara dan sudari Equilibriumers sahabat-sahabat saya diluar sana yang telah mendukung dan berjalan sama. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan pengertiannya.
12. Teman-teman angkatan penulis , Erudate, , dan kakak - kakak dan adik – adik Himajie yang penulis tidak dapat sebutkan satu- persatu. Terima kasih atas segala kenangannya.

Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam melakukan penulisan skripsi ini dan senantiasa mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. dan diberi balasan dengan sebaik- baik balasan-Nya. Aamiin Ya Robbal „Alamin.

Wassalamu“alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

Makassar, Agustus 2024



Muhammad Mihraj Arib

ABSTRAK

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB),
BELANJA MODAL, JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR**

Muhammad Mihraj Arib

Sanusi Fattah

Agung Ady Mangilep

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari produk domestik regional bruto (pdrb), belanja modal, jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah di kota makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (time series) dan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prroduk domestic regional bruto berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, selanjutnya Belanja Modal Bepengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Makassar, Adapun variable jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Makassar.

Kata Kunci: produk domestik regional bruto, belanja modal, jumah penduduk, kemandirian keuagan daerah

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT (PDRB), CAPITAL EXPENDITURE, POPULATION ON REGIONAL FINANCIAL INDEPENDENCE IN MAKASSAR CITY

Muhammad Mihraj Arib

Sanusi Fattah

Agung Ady Mangilep

This study aims to determine how the influence of gross regional domestic product (pdrb), capital expenditure, population on regional financial independence in Makassar city. The data used in this study are secondary data (time series) and use multiple linear regression analysis methods. The results of this study indicate that gross regional domestic product has a significant effect on regional financial independence, then capital expenditure has a significant effect on regional financial independence in Makassar City, while the population variable has no significant effect on regional financial independence in Makassar City.

Keywords: gross regional domestic product, capital expenditure, population, regional financial independence

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teoritis	17
2.1.1 Pengertian Pajak.....	17
2.1.2 Pengertian Dan Konsep Otonomi Daerah.....	18
2.1.3 Dana Perimbangan	19
2.1.4 Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	20
2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto	23
2.1.6 Belanja Modal	25
2.1.7 Jumlah Penduduk	29
2.2 Hubungan Antara Variabel	32
2.2.1 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	32
2.2.2 Hubungan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	33

2.2.3 Jumlah Penduduk Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	34
2.3 Studi Empiris	35
2.4 Kerangka Konseptual.....	37
2.5 Hipotesis Penelitian.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	39
3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	39
3.3 Metode Pengumpulan Data	39
3.4 Metode Analisis Data	40
3.5 Uji Asumsi Klasik.....	41
3.5.1 Uji Normalitas.....	41
3.5.2 Uji Heteroskedastisitas	41
3.5.3 Uji Autokorelasi	42
3.5.4 Uji Multikolinearitas	42
3.6 Pengujian Hipotesis	42
3.7 Definisi Operasional	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Perkembang Variabel Yang Diteliti	47
4.1.1 Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	47
4.1.2 Perkembangan Produk Domestik Bruto Di Kota Makassar.....	50
4.1.3 Perkembangan Belanja Modal	51
4.1.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Makassar	53
4.2 Uji Asumsi Klasik.....	54
4.2.1 Uji Normalitas.....	54
4.2.2 Uji Heteroskedastisitas	55
4.2.3 Uji Autokorelasi	55
4.2.4 Uji MultiKolinearitas.....	56
4.3 Hasil Estimasi Penelitian.....	56
4.4 Pembahasan.....	60
4.4.1 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	60

4.4.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	61
4.4.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	63
BAB V PENUTUP	65
5.1 KESIMPULAN	65
5.2 SARAN	65
Daftar Pustaka	67
LAMPIRAN	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Makassar	6
Gambar 1. 2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Makassar, Gowa, Maros)	7
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	38
Gambar 4. 1 PDRB Harga Berlaku Kota Makassar	50
Gambar 4. 3 Belanja Aset Kota Makassar Tahun 2000 -2022	52
Gambar 4. 4 Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2000 - 2022	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 - 2022	9
Tabel 1. 2 Belanja Aset Kota Makassar Tahun 2000 - 2022	12
Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2000 - 2022.....	14
Tabel 2. 1 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah.....	22
Tabel 4. 1 Rekapitulasi Perhitungan Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2000 - 2022.....	48
Tabel 4. 2 Hasil Estimasi Regresi.....	57

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami fluktuasi, diawali dari era Orde Lama Indonesia menerapkan sentralisasi dimana semua urusan pemerintahan masih terpusat di pemerintah pusat dengan tujuan untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional. Penerapan sistem ini masih berlanjut sampai Orde Baru namun seiring dalam perjalanannya menumbuhkan rasa tidak puas daerah terhadap pemerintah pusat hingga pemerintah daerah merasa dikekang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dianggap tidak adil terhadap daerah, kekayaan daerah dikuasai sementara, pembangunan daerah kurang diperhatikan sehingga timbulah kecemburuan daerah terhadap pemerintah pusat sehingga terjadi evaluasi besar-besaran terhadap sistem sentralisasi. Hingga pada akhirnya pada periode setelah Reformasi berhasil dikeluarkan kebijakan otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal kepada pemerintahan daerah.

Pengaplikasian dari otonomi daerah secara resmi dijalankan di Indonesia mulai 1 Januari 2001 dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004, dalam upaya memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mencari sumber – sumber pendapatan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. tujuan dari pelaksanaan

otonomi daerah, salah satunya untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat (Ariani & Putri 2016). Penerapan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi memiliki peran luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Pemerintah daerah melalui dua strategi utama, diantara-Nya; Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidak merataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Dalam aturan Undang – Undang nomor 32 tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah dari pusat masih terbatas hanya di beberapa sektor yakni sektor perkebunan, perhubungan, pekerjaan umum dan kehutanan sedangkan untuk urusan sektor keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter serta peradilan dan agama masih diatur oleh pemerintah pusat. Tak hanya di pengolahan beberapa sektor, otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yakni, suatu sistem pembagian keuangan yang adil,

proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pengendalian penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantu.

Menurut (Karamoy H, Poputra A.T 2014) saat ini, kedua UU di atas juga sedang dalam proses revisi untuk mendapatkan suatu pola yang sesuai mengingat perubahan lingkungan yang terjadi serta banyak permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan otonomi sehingga mengaburkan misi dari otonomi daerah. Terdapat tiga misi utama dalam otonomi daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Pembangunan daerah dalam era otonomi seharusnya dapat dibiayai sendiri oleh pemerintah daerah melalui pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah. Paling tidak pemerintah berupaya memperkecil ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pembangunan daerahnya. Pendapatan asli daerah merupakan bagian sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan tolak ukur bagi kemampuan keuangan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dan mencerminkan kemandirian daerah di era otonomi (Syafitri Helda 2010).

Kemandirian keuangan daerah di era otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor penting diantaranya oleh pertumbuhan ekonomi daerah serta Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Kehidupan perekonomian yang mengalami

peningkatan setiap tahunnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif. Kondisi ini akan memacu peningkatan pendapatan masyarakat, Peningkatan pendapatan akan mendorong kesadaran masyarakat untuk makin giat membayar pajak dan retribusi daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami peningkatan. Semakin bertambahnya PAD di suatu daerah akan menciptakan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik setiap tahunnya. (Krest Tolosang, 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Kemandirian Keuangan daerah berarti pemerintah suatu daerah dapat menjalankan pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangannya sendiri, melakukan kegiatan sendiri dalam upaya mencapai asas desentralisasi. Suatu daerah dikatakan mandiri jika ketergantungan kepada pemerintah pusat relatif kecil atau daerah itu mampu membiayai kebutuhan di daerahnya, dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan di daerahnya, dengan harapan kemandirian keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik. Menurut Halim (2007: 23), keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”. Menurut Halim (2007:232) “Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman”.

Permasalahan kemandirian keuangan daerah yang merupakan tujuan desentralisasi fiskal dan otonomi sudah lama terjadi pada banyak negara. Otonomi fiskal pemerintah daerah di Korea serta hubungan antar pemerintah pada tahun 1990-an yang diteliti Kim dan Young (2003) berfokus pada keuangan fiskal, administrasi dan sentralisasi politik. Koo dan Kim (2018) meneliti dua wajah desentralisasi di Korea Selatan yang berfokus pada gambaran desentralisasi di Korea Selatan dengan tiga perspektif yang berbeda yaitu perspektif politik, administrasi dan keuangan fiskal. Di Albania terjadi modernisasi pemerintah daerah diteliti Guga (2018) dengan fokus penelitiannya pada keseluruhan proses desentralisasi terhadap reformasi administrasi-teritorial. Penelitian Kim dan Young (2003), Koo dan Kim (2018), Guga (2018) menemukan bahwa adanya ketergantungan yang sangat tinggi pemerintah daerah Korea dan Albania dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pada transfer keuangan pemerintah pusat. Di Albania pemerintah daerah menerima pendapatan dari pemerintah pusat sebesar 90% dari pendapatannya. Pendapatan daerah di tahun 2015 hanya 4% dari total pendapatannya, sementara lebih dari dua kali pendapatan pajak yang dikumpulkan dibelanjakan daerah (Guga,2018). Kim dan Young (2018) menyebutkan bahwa pemerintah daerah di Korea memiliki ketergantungan yang lebih parah terhadap keuangan pemerintah pusat dibandingkan negara industri lainnya. Di beberapa daerah pedesaan, pemda hanya dapat menghasilkan 10% pendapatan mereka dari pajak (Handayani, T.U & Erinos 2019).

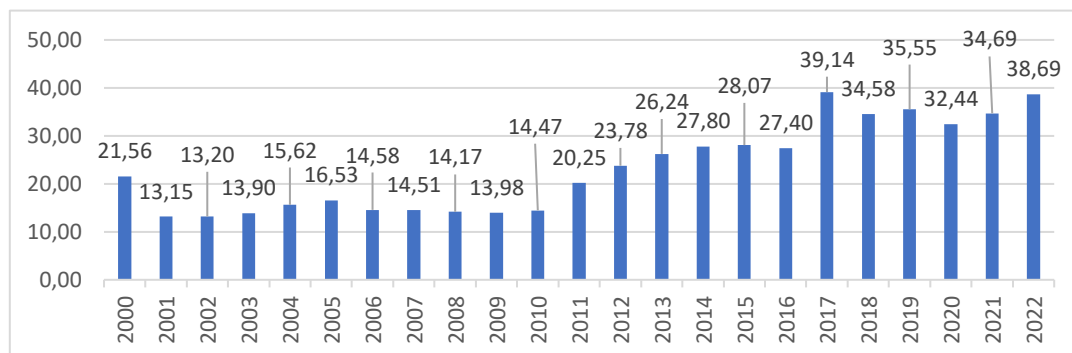
Fenomena yang terjadi di Pemerintah daerah Indonesia ialah relatif kecilnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Pemerintah Daerah (APBD). Dengan maksud peran pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak Mendominasi susunan APBD. Semestinya bantuan yang diberikan pemerintah pusat hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. (Triganda Rezqi, 2018).

Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, dimana sektor-sektor di kota ini sangat mendukung pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, sosial, kesehatan, hingga infrastruktur sangat berkembang pesat demi mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu alasan Kota Makassar dinilai lebih unggul dibandingkan dengan Kota atau Kabupaten lain yang ada di Sulawesi Selatan hingga diharapkan mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Tetapi dalam realisasinya pengelolaan Pemerintah di Makassar masih tergolong rendah dilihat pada rasio kemandirian tahun 2000 – 2022.

Gambar 1. 1 Rasio Kemandirian Keuangan Derah Kota Makassar

Tahun 2000 - 2022

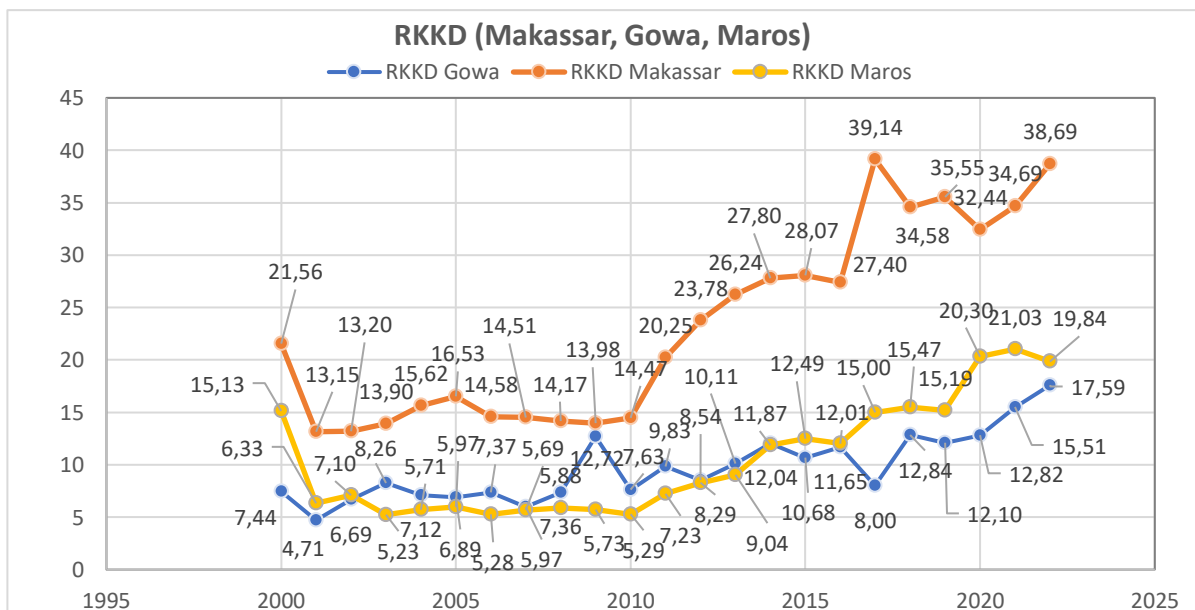


Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Badan Pusat Statistik

Makassar, Diolah (2023).

Berdasarkan gambar 1.1 Kemandirian Keuangan Daerah Kota Makassar selama periode 2000 – 2022 menunjukkan angka yang rendah. Rasio kemandirian Kota Makassar tergolong fluktuatif, pada tahun 2000 (RKKD) Makassar sebesar 21,56% dan mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi 13,15%, dari tahun 2001 – 2010 mengalami fluktuatif dan tidak meningkat secara signifikan. Walaupun Di tahun 2011 – 2022 mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2022 menjadi 38,69% namun kemandirian keuangan daerah Kota Makassar masih belum tergolong mandiri. Dapat dilihat dari data tersebut selama 22 tahun di Makassar masih memiliki pola hubungan kemandirian dalam taraf Konsultatif dan kemampuan keuangan berada ditingkat rendah. Kecilnya kontribusi yang diberikan oleh PAD dari Total Pendapatan Daerah Kota Makassar masih bergantung dalam memanfaatkan sumber yang ada, dan membiayai rumah tangga daerahnya, dalam hal ini Kota Makassar masih memiliki tingkat ketergantungan terbilang tinggi dan dapat diatur secara konstitusi.

Gambar 1. 2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Makassar, Gowa, Maros)



Berdasarkan gambar 1.2 Kemandirian keuangan daerah dari Makassar, Gowa, dan Maros mengalami fluktuatif. Makassar memiliki rasio kemandirian tertinggi sebesar 38,69% tahun 2022, Maros berada di urutan kedua dengan kemandirian sebesar 19,84% tahun 2022, Dan yang menempati posisi akhir adalah kabupaten Gowa dengan kemandirian sebesar 17,59% tahun 2022. Walaupun ke tiga Kabupaten mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi Kabupaten – Kabupaten tersebut dalam golongan rendah sekali untuk Maros dan Gowa dan hanya Makassar yang dapat naik ke golongan rendah. Fenomena tersebut terjadi karena pemerintah daerah belum dapat mampu mengurus sumber daya manusia dan sumber daya alamnya di daerahnya sendiri. Hal tersebut membuat pendapatan asli daerah yang didapatkan pemerintah daerah sangat kecil.

Menurut Lovell (1981:197) memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah otonom terhadap transfer pemerintah pusat akan menyebabkan semakin tingginya ketergantungan kebijakan (*policy dependency*) pemerintah daerah otonom terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan kebijakan mencakup tanggung jawab, prosedur, atau kegiatan yang dibebankan oleh suatu tingkatan pemerintah kepada tingkatan pemerintah lainnya lewat konstitusi, legislatif, eksekutif, atau tindakan yudisial yang merupakan perintah langsung ataupun sebagai persyaratan bantuan.

Berbagai macam permasalahan yang muncul di pemerintah daerah bukan hanya mengenai pengelolaan keuangan yang diterima dari pemerintah pusat, tetapi bagaimana pemerintahan daerah dapat mengelola sumber daya daerahnya secara mandiri dengan memikirkan cara mendapatkan sumber pendapatan alternatif

dengan melihat potensi – potensi di Wilayah administrasinya sendiri. Potensi yang dapat dilihat dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Gambaran perekonomian secara makro suatu daerah diperlihatkan oleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan per jumlahan nilai tambah bruto dari sektor ekonomi yang berperan dalam kegiatan perekonomian tersebut. Kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam dimilikinya dapat dilihat dengan besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing – masing Provinsi atau Kabupaten oleh karena itu Provinsi atau Kabupaten sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam yang dimilikinya (Rinaldi,Nursyam MN 2013). Menurut Putri (2014) Salah satu faktor yang mempengaruhi Kemandirian keuangan daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Apabila PDRB meningkat, maka hal ini mengindikasikan terdorongnya peningkatan pendapatan asli daerah. Tingginya PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas maka dapat disajikan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2000 – 2022 melalui tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2000 - 2022**

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
2000	Rp. 7.114.355.260.000
2001	Rp. 8.475.436.170.000
2002	Rp. 9.664.573.140.000
2003	Rp. 11.131.683.000.000
2004	Rp. 13.127.239.000.000

2005	Rp. 15.774.194.000.000
2006	Rp. 18.165.877.000.000
2007	Rp. 20.794.721.000.000
2008	Rp. 26.068.221.000.000
2009	Rp. 31.263.651.000.000
2010	Rp. 58.556.467.430.000
2011	Rp. 67.281.771.030.000
2012	Rp. 78.013.037.500.000
2013	Rp. 88.363.458.100.000
2014	Rp. 100.398.532.800.000
2015	Rp. 114.432.125.900.000
2016	Rp. 128.045.370.000.000
2017	Rp. 142.448.700.000.000
2018	Rp. 160.207.660.000.000
2019	Rp. 178.430.060.000.000
2020	Rp. 178.332.990.000.000
2021	Rp. 190.318.070.000.000
2022	Rp. 208.935.790.000.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Makassar, Diolah (2023).

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto di Kota Makassar pada tahun 2000 – 2022 mengalami peningkatan drastis. Total PDRB terendah terjadi pada tahun 2000 sebesar 7.114.355 triliun rupiah, sedangkan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 208.935.790 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan sektor ekonomi yang berperan sangat baik dalam kegiatan perekonomian di Kota Makassar.

Belanja modal juga memiliki peranan dalam membentuk kemandirian keuangan daerah. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 53 belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gudang dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan

dan aset tetap lainnya. Keberadaan anggaran belanja modal yang bersumber dari bantuan pusat dan pendapatan asli daerah mempunyai strategis, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha dan pemenuhan pelayanan masyarakat. Menurut Handayami, T.U dan Erinosa (2019) Belanja modal adalah Pengeluaran anggaran agar mendapatkan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Dalam menjalankan aktivitasnya, pemerintah menggunakan instrumen belanja yang tertuang dalam APBN dan APBD untuk mendanai semua kegiatannya. Sebagian dari belanja pemerintah tersebut dialokasikan dalam pos belanja modal. Belanja modal pemerintah merupakan permintaan atas output perekonomian dalam rangka pembentukan aset yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran. Oleh karena itu belanja modal menjadi investasi pemerintah pada sektor publik yang sangat penting untuk mendorong perekonomian dan pemerataan pendapatan karena dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Adanya fasilitas yang menandai di tingkat wilayah akan meningkatkan produktivitas penduduk dan membuat investor tertarik menanamkan modalnya yang akan meningkatkan PAD sehingga terwujud kemandirian finansial wilayah (Siagian Sashita, A.R 2022).

Untuk melihat Belanja Modal menjadi investasi pemerintah sebagai pembentukan aset di Kota Makassar, dapat dilihat dengan data belanja aset pemerintah daerah berupa PMDN dan PMA Kota Makassar tahun 2000 – 2022 melalui tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Belanja Aset Kota Makassar Tahun 2000 - 2022

Tahun	Belanja Asset (Investasi)	
	PMDN (Miliar Rupiah)	PMA (Miliar Rupiah)
2000	Rp.11.262.000.000	Rp.70.869.600.000
2001	Rp.484.608.000.000	Rp.54.040.000.000
2002	Rp.32.703.305.000	Rp.47.848.560.000
2003	Rp.102.156.000.000	Rp.56.213.826.000
2004	Rp.25.632.300.000	Rp.56.267.701.500
2005	Rp.473.713.400.000	Rp.71.121.453.000
2006	Rp.66.887.000.000	Rp.891.516.618.400
2007	Rp.439.184.079.129	Rp.239.385.549.900
2008	Rp.1.044.228.700.000	Rp.1.550.046.315.834
2009	Rp.114.968.100.000	Rp.972.089.791.000
2010	Rp.295.446.500.000	Rp.130.455.531.000
2011	Rp.872.311.800.000	Rp.241.118.760.000
2012	Rp.464.166.900.000	Rp.307.788.680.000
2013	Rp.581.586.300.000	Rp.2.400.677.592.000
2014	Rp.546.869.600.000	Rp.1.441.240.624.000
2015	Rp.856.449.300.000	Rp.485.767.104.000
2016	Rp.906.046.100.000	Rp.803.829.560.000
2017	Rp.762.295.066.477	Rp.3.523.653.496.000
2018	Rp.661.049.400.000	Rp.1.768.228.944.000
2019	Rp.3.067.061.100.000	Rp.1.495.557.000.000
2020	Rp.5.175.997.200.000	Rp.295.402.712.000
2021	Rp.7.557.843.800.000	Rp.776.605.752.000
2022	Rp.3.428.712.800.000	Rp.488.676.000.000

Sumber : *National Single Window For Investment*. Diolah (2023).

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa belanja aset di Kota Makassar pada tahun 2000 – 2022 mengalami fluktuatif. PMDN terendah terjadi pada tahun 2000 sebesar 11.262 miliar rupiah, sedangkan yang tertinggi pada tahun 2021 sebesar 7.557 triliun rupiah. Sedangkan dalam PMA yang dimana terendah terjadi pada tahun 2002 sebesar 47.848 miliar rupiah, sedangkan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 3.523 triliun rupiah.

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi kemandirian keuangan daerah ialah jumlah penduduk, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap, Jumlah Penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu: fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), migrasi (Badan Pusat Statistik 2022). Menurut Syntia Okky Pratiwi (2016) dalam Halim (2001) penduduk memiliki peran dalam melakukan tindakan ekonomi, sesuai asumsi klasik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Besar kecilnya pendapatan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang di tetapkan pemerintah begitu pula sebaliknya. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang didapat dari sumber daya daerah berdasarkan regulasi yang berlaku di daerah tersebut. Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda karena perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk akan membuat jumlah konsumsi penduduk bertambah, maka akan bertambah pula pendapatan retribusi dan pajak, secara otomatis pendapatan asli daerah akan ikut bertambah. Peningkatan PAD ini kemudian akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan di suatu daerah, artinya daerah tersebut bisa secara mandiri menyelenggarakan pemerintahannya dan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi secara maksimal. (Achla Nurus Shoba 2022).

Dapat dilihat jumlah penduduk yang berada di kota makassar melalui data jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2000 – 2022 melalui tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2000 - 2022

Tahun	Jumlah Penduduk
2000	1.112.688
2001	1.130.384
2002	1.148.312
2003	1.160.011
2004	1.179.023
2005	1.193.434
2006	1.223.540
2007	1.235.239
2008	1.253.656
2009	1.272.349
2010	1.339.374
2011	1.352.136
2012	1.369.606
2013	1.408.072
2014	1.429.242
2015	1.449.401
2016	1.469.601
2017	1.489.011
2018	1.508.154
2019	1.526.677
2020	1.423.877
2021	1.427.619
2022	1.432.189

Sumber : Badan Pusat Statistik Makassar, Diolah (2023).

Pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Makassar pada 2000 – 2022 mengalami peningkatan secara signifikan. Seperti pada tahun 2000 sebesar 1.112.688 juta jiwa sampai dengan tahun 2019 sebesar 1.526.677 juta jiwa, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 1.423.877 juta jiwa.

Berdasarkan uraian latar belakang yang di kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Produk Domestik**

Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal, Jumlah Penduduk Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Makassar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Makassar ?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Makassar ?
3. Apakah Jumlah Penduduk terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Makassar
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Makassar

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak sebagai berikut:

1. Kalangan akademisi dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penulisan yang akan datang yang berkaitan dengan tema yang diangkat
2. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan UU NO. 07 Tahun 2021 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran yang dibayarka oleh warga negara kepada negara sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Iuran ini bersifat wajib dan dapat dipaksakan tanpa diiringi dengan balas jasa khusus.

Pendapatan negara kebanyakan berasal dari rakyatnya diperoleh dari pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang berada di dalam negara itu. Kedua sumber pendapatan itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Hal tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan publik yang akhirnya dapat berdampak kepada kepentingan pribadi, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan sebagainya. Dalam teori kepentingan pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya.

2.1.2 Pengertian Dan Konsep Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari kata Yunani *autos* dan *nomos*. Kata pertama berarti sendiri dan kata kedua berarti pemerintah. Otonomi bermakna memerintah sendiri, dalam wacana administrasi publik daerah sering disebut sebagai *local selfgovernment*. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Otonomi sendiri berarti adanya kebebasan menjalankan atau melaksanakan sesuatu oleh suatu unit politik atau bagian wilayah dalam kaitannya dengan masyarakat politik atau negara. Otonomi daerah adalah dimana kewenangan untuk menjalankan fungsi atau mengurus daerah sendiri tidak datang begitu saja tetapi merupakan keputusan politik yang ditempuh guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Otonomi daerah menjadi bagian dari sub sistem desentralisasi dan pemerintahan daerah, bukanlah suatu sistem atau faktor yang konstan adanya, tapi harus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan pergeseran garis politik dan perundang – undangan mengenai pemerintah daerah. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh UUD dan garis politik yang sedang berlaku dalam negara (Nurmiati, dkk 2019)

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat, menciptakan Efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002:59).

Momentum otonomi daerah saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya (Mardiasmo, 2002). Untuk itu, hal yang pertama kali perlu dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah melakukan perbaikan lembaga (*institutional reform*), perbaikan sistem manajemen keuangan publik, dan reformasi manajemen publik. Oleh karena itu, untuk dapat membangun landasan perubahan yang kuat, pemerintah perlu melakukan perenungan kembali (*Rethinking Government*) yang kemudian diikuti dengan *reinventing government* untuk menciptakan pemerintah yang baru yang lebih baik.

2.1.3 Dana Perimbangan

Ghuman & Singh (2013) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai transfer kekuatan, kekuasaan, dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah yang lebih rendah. Teori desentralisasi berawal dari konsep yang dikembangkan oleh *Tiebout Hypotesis* pada tahun 1956. Tiebout menyebutkan bahwa pemerintah yang lebih rendah menawarkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai pengganti pajak. Dengan konsep tersebut maka pemerintah daerah memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat yang ada di daerah pemerintah daerah. Dengan cara ini, pemerintah daerah yang heterogen berhasil menyelesaikan berbagai masalah inefisiensi penyediaan layanan publik lokal (Michael, 2008).

Oates (1972) mengemukakan teori desentralisasi bahwa pelayanan publik harus disediakan oleh pemerintah daerah setempat yang dekat dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa alasan utama mendasar yaitu:

- a. Pemerintah daerah dianggap paling mengerti akan masyarakat setempat;
- b. Keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan pelayanan publik dianggap lebih efisien dan cepat jika dilakukan desentralisasi;
- c. Dapat menghilangkan sekat-sekat penghalang keputusan dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan publik;
- d. Dapat meningkatkan inovasi persaingan balik antar pemerintah daerah.

2.1.4 Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah menurut Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berarti pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Halim (2007) mengemukakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik menggunakan sumber daya keuangan yang digali dari potensi daerahnya sendiri.

Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain

misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern, terutama pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah. Formula yang digunakan untuk menentukan tingkat kemandirian daerah, yaitu dengan menggunakan rasio kemandirian daerah, sebagai berikut (Halim, 2007).

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Musgrave (1991), untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah yaitu perbandingan PAD dengan Realisasi Total Pendapatan Daerah (TPD). Semakin tinggi derajat Desentralisasi Fiskal suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat kemandirian daerah tersebut. Definisi dari rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal terutama Pemerintah Pusat Dan Provinsi. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kemandirian keuangan suatu daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin tinggi. Secara teknisnya, pola hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat dilaksananya jika sesuai dengan kemampuan suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Hersey dan Blanchard (1993) mengenalkan “hubungan situasional” mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah,

Tabel 2. 1 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Halim (2007)

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Selain itu, rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

Hersey dan Blanchard (1993) mengungkapkan relasi diantara pemerintahan daerah dengan pusat untuk melakukan kebijakan otonomi khususnya mengenai hubungan pelaksanaan peraturan terkait pemerataan keuangan, yaitu:

1. Pola hubungan instruktif

Rasio kemandirian pola hubungan instruktif berada dalam rentang rasio 0%-25%, menunjukkan kemampuan suatu daerah tergolong rendah sekali. Artinya finansial pemerintah daerah tidak mencukupi untuk menjalankan otonomi

daerah sehingga pemerintah pusat berperan sangat besar dalam menunjang kemampuan keuangan daerah.

2. Pola hubungan konsultatif

Pola hubungan konsultatif terjadi dalam rentang rasio >25%-50%, yang menunjukkan kapasitas keuangan suatu daerah rendah. Karena kapasitas otonomi daerah dianggap sedikit lebih tinggi, fungsi pemerintah pusat menurun dan cenderung memberikan konsultasi.

3. Pola hubungan partisipatif

Apabila rasio kemandirian suatu daerah sebesar >50%-75%, kemampuan keuangan daerah tersebut dikategorikan sedang. Dalam pola ini, masih ada intervensi pemerintahan pusat, tapi telah menurun seiring dengan upaya pemerintah daerah untuk mencapai otonomi wilayah.

4. Pola hubungan delegatif

Suatu daerah mencapai pola hubungan delegatif apabila kemampuan keuangan daerah tersebut tergolong tinggi dengan rasio sebesar 75%-100%. Pemerintah pusat berkeyakinan untuk secara penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah serta tidak lagi turun tangan karena daerah dianggap telah mandiri.

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau yang lebih dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai

tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Laju pertumbuhan PDRB disumbang oleh sembilan faktor, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa- jasa. Pada dasarnya, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor ekonomi. (BPS, 2015) Perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Metode tak langsung biasa digunakan jika data yang diperlukan untuk menghitung PDRB tidak tersedia.

Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB secara riil (tidak ada pengaruh harga). Ada empat cara yang

dikenal untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu: revaluasi, ekstrapolasi, deflasi dan deflasi berganda. Menurut BPS, kegunaan PDRB dan PDRB per kapita adalah:

- 1) PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- 2) PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, setiap sektor atau komponen penggunaan dari tahun ke tahun.
- 3) PDRB per kapita atas dasar harga yang berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- 4) PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

2.1.6 Belanja Modal

Pengeluaran pemerintah ialah pembelanjaan barang-barang modal, barang konsumsi dan jasa-jasa. Pengeluaran pemerintah merupakan penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan atau program - program yang diselenggarakan pemerintah untuk mewujudkan fungsinya dalam menciptakan kesejahteraan. Teori Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tiga tahapan, yaitu tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi. Pada tahap ini pemerintah harus menyediakan

prasarana. Tahap menengah pemerintah menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik dikarenakan peranan swasta yang semakin besar. Pada tahap lanjut, Rostow berpendapat bahwa terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran layanan sosial, seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan masyarakat dan sebagainya (Wijayanti, 2002).

Belanja modal dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja modal ialah pengeluaran yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pengalokasian anggaran untuk belanja modal mempunyai tujuan untuk menambah aset tetap pemerintah. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana publik. Menurut Pendirjenan Perbendaharaan No.PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan bagan akun standar, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap, atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.

2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual, tetapi untuk kegiatan operasional sehari-hari.

Dalam Buletin Teknis No.4 Komite Standar Akuntansi Pemerintah, dijelaskan bahwa belanja modal meliputi:

1. Belanja Tanah, yaitu pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan pembelian atau pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, perataan dan pematangan tanah serta pembuatan sertifikat.
2. Belanja Peralatan dan mesin, yaitu biaya yang digunakan untuk pengadaan penambahan penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor
3. Belanja Modal Gedung dan bangunan, yaitu pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/penggantian/penambahan termasuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai Gedung tersebut dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan /pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk

perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan tersebut dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja aset tetap lainnya, pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/pembangunan/ pembuatan serta perawatan, terhadap fisik lainnya. Belanja modal termasuk belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum.

Menurut Halim (2012:72) belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal memiliki peranan yang strategis karena karena sasaran penggunaannya untuk membiayai di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat. Tersedianya struktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan semakin tinggi dan pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Rendahnya ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat menunjukkan daerah tersebut adalah daerah yang mandiri, yang memungkinkan daerah untuk membiayai urusan pemerintahannya.

2.1.7 Jumlah Penduduk

Menurut BPS (2022) penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap, Jumlah Penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu: fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), migrasi. Penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau negara serta mentaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau negara tersebut. Penduduk merupakan salah satu faktor produksi yang paling banyak kita miliki, yaitu faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja yang relatif banyak tersedia merupakan salah satu keunggulan komparatif (*comparatif advantage*) bagi suatu negara atau daerah dalam usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui serangkaian output baik barang atau jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk. Adam Smith mengemukakan bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Dengan didukung bukti empiris bahwa Jumlah Penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2010).

Ilmu demografi adalah alat yang menggunakan data dan statistik kependudukan, serta penghitungan matematis dan statistik data kependudukan, untuk mempelajari perubahan kependudukan, terutama perubahan kuantitas,

persebaran, dan komposisi / struktur. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan komponen utama Jumlah Penduduk (yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi), yang pada gilirannya menyebabkan perubahan ukuran, struktur, dan distribusi populasi. Marhaeni (2017:7).

Ruang Lingkup Ilmu Kependudukan

Menurut Kementerian Keuangan (2015) Ilmu kependudukan memiliki dua ruang lingkup, yaitu:

a. Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang biasanya tinggal di suatu tempat atau berkeluarga selama 6 bulan atau lebih, atau yang sudah 6 bulan tidak tinggal tetapi berniat untuk hidup.

b. Masyarakat

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang senantiasa berinteraksi menurut adat istiadat tertentu dan terikat oleh identitas.

c. Komposisi Penduduk

Komposisi Penduduk menurut Kementerian Keuangan (2015), yaitu:

a. Biologi: umur, jenis kelamin

b. Sosial: pendidikan, status

c. Ekonomi: jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, tingkat pendapatan

d. Geografi: tempat tinggal

e. Budaya: agama, adat istiadat, dan lain sebagainya (Marhaeni,2017).

Penduduk merupakan salah satu faktor penting, alasannya sederhana, karena penduduk merupakan sumber daya manusia yang partisipasinya sangat diperlukan

agar pelaksanaan hasil-hasil perencanaan dapat berjalan dengan baik. Dalam buku Todaro (2000) disebutkan bahwa Jumlah Penduduk bukanlah suatu masalah. Pengaruh jumlah penduduk pada tingkat moderat pada dasarnya positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, baik bagi negara-negara maju maupun yang sedang berkembang. Semakin banyak orang maka semakin banyak ide, semakin banyak orang yang mempunyai bakat dan kreatif, semakin banyak tenaga ahli dan dengan demikian akan semakin berkembang teknologi. Selanjutnya dalam jangka panjang penduduk merupakan suatu keuntungan. Jumlah Penduduk juga merangsang pembangunan ekonomi. Semakin besar jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi dan akan mendorong "*economic of scale*" dalam berproduksi, sehingga akan menurunkan biaya produksi. Penduduk dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat akan cenderung meningkat. Dengan adanya kecenderungan pertambahan jumlah penduduk pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah (Sukirno, 2003).

2.2 Hubungan Antara Variabel

2.2.1 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Sadono Sukirno (2005), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan, nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah dalam periode tertentu yang menjumlahkan semua hasil dari masyarakat daerah tersebut ditambah dengan masyarakat daerah lain yang bekerja di daerah tersebut, sehingga PDRB merupakan suatu ukuran untuk melihat aktivitas perekonomian suatu daerah.

Menurut Rinaldi & Nursyam (2013) dalam penelitiannya mengatakan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa PDRB dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator Kemandirian Keuangan Daerah, Peningkatan barang dan jasa yang diproduksi oleh 9 (sembilan) lapangan usaha dalam PDRB, orang yang terlibat dalam lapangan usaha tersebut akan memperoleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan pemerintah daerah, sehingga semakin tinggi pungutan yang diterima oleh pemerintah daerah, mengakibatkan semakin tinggi pendapatan yang diterima daerah, sehingga semakin tinggi pendapatan asli daerah maka makin tinggi kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mempunyai pemahaman terhadap PDRB, bahwa proses terjadinya kenaikan PAD ditentukan oleh berbagai aspek, dan adanya saling keterkaitan berbagai sektor ekonomi.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Evi Adriani (2008) menyimpulkan bahwa PDRB, berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD

sebagai indikator kemandirian keuangan daerah. Peningkatan realisasi PDRB menunjukkan bahwa daerah menghasilkan produksi dari potensi ekonomi yang dapat meningkatkan pungutan pajak dan hasil bukan pajak. Kalau pungutan pajak meningkat dan bagi hasil bukan pajak meningkat maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah, seiring meningkatnya PAD maka Kemandirian Keuangan Daerah ikut meningkat.

2.2.2 Hubungan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan

Daerah

Sumber pendapatan daerah harus terus dapat ditingkatkan dalam pelaksanaan otonomi daerah karena akan diperlukan untuk mendanai kegiatan pemerintahan dalam bentuk belanja modal dan belanja operasi, banyaknya belanja modal yang dibiayai oleh keuangan daerah menunjukkan daerah tersebut dapat menjalankan pemerintahannya.

Tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk membiayai belanja-belanja daerahnya termasuk belanja modal seperti pembangunan dan perbaikan di berbagai sektor. Semakin tinggi tingkat investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembayaran pajak yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Menurut Halim (2002) menyatakan bahwa sebagian besar APBD masih mengabaikan analisis kinerja keuangan sehingga memunculkan dugaan apakah APBD yang disusun pemerintah daerah sudah efektif atau sebaliknya. Melihat penelitian yang dilakukan oleh Defitri, Siska Yulia (2020) dimana hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Sedangkan dalam penelitian Sulaiman,dkk (2021) telah menemukan bukti empiris bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh. Hal ini dikarenakan sebagian besar daerah mengalokasikan belanja modal untuk membiayai belanja rutin pegawai.

2.2.3 Jumlah Penduduk Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Taryoko (2016) mengatakan Peningkatan daya beli masyarakat ini tentu akan menjadikan tambahan pendapatan bagi daerah, sehingga kemandirian keuangan daerah meningkat. Selain itu, jumlah penduduk yang menempati suatu daerah juga akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jumlah Penduduk yang semakin besar, maka akan menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Adanya tuntutan tersebut menjadikan pemerintah terdorong untuk meningkatkan kinerja (dalam hal ini kemandirian keuangan daerah) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Darmanto (2012) menyatakan bahwa salah satu indikator yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, yaitu pemerintah daerah yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Jumlah populasi penduduk yang menempati daerah juga berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Semakin besar Jumlah Penduduk suatu daerah, maka akan menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Jumlah Penduduk mempengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak Jumlah Penduduk maka semakin banyak pula tuntutan pada pemerintah daerah atas pelayanan publik yang baik.

Penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau negara serta mentaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau negara tersebut. Penduduk merupakan salah satu faktor produksi yang paling banyak kita miliki, yaitu faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja yang relatif banyak tersedia merupakan salah satu keunggulan komparatif (*comparatif advantage*) bagi suatu negara atau daerah dalam usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui serangkaian output baik barang atau jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk. Penduduk dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat akan cenderung meningkat. Dengan adanya kecenderungan penambahan penduduk yang bekerja maka semakin banyak pula dapat membayar pajak pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah (Sukirno, 2003).

2.3 Studi Empiris

Taryoko (2016) yang meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2013”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pdrb berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan, jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sumber daya alam berpengaruh positif

terhadap kemandirian keuangan daerah, dan seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Kartim (2018) yang meneliti tentang “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Papua”. Hasil penelitian menunjukkan variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, Jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dalam skripsi ditulis oleh Andardini Resti,S.E (2019) yang berjudul “Pengaruh Dana Bergulir, Investasi Daerah, Produk Domestik Regional Bruto,Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial, Dana Bergulir, Produk Domestik Regional Bruto, dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah tetapi Investasi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara simultan, Dana Bergulir, Investasi Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Belanja Modal memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

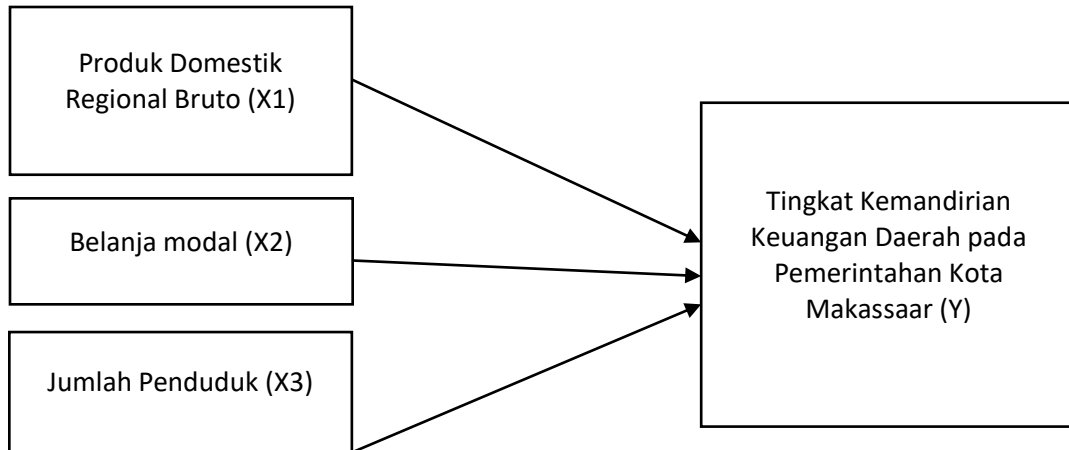
Penelitian yang telah dilakukan oleh Rinaldi, Nursyam MN (2013) tentang “Pengaruh Realisasi Belanja Modal, *Fiscal Stress*, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur)”. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Belanja Modal, Stres Fiskal dan PDRB secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap Kemandirian *Financial District/Kota* di Provinsi Kalimantan Timur. Pengeluaran Sebagian Capital tidak signifikan namun positif efek, Fiscal Stress tidak signifikan, namun efek positif, sedangkan PDRB memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap Kemerdekaan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Persada Teguh (2022) tentang “Pengaruh Investasi Daerah, Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial, Investasi Daerah, Belanja Modal, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif. Secara simultan variabel Investasi Daerah, Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2016-2020.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan keterkaitan teori-teori yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti membuat kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Dari kerangka konseptual diatas, dapat diuraikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Modal, Jumlah Penduduk variabel independen yang akan memengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel dependen.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Diduga Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.